



**PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DAN PELAYANAN PARKIR TERHADAP KINERJA
BADAN PENGELOLA PERPARKIRAN DI
KECAMATAN MEDAN HELVETIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

FRISKA MARPAUNG

NPM : 1415100097

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FRISKA MARPAUNG
NPM : 1415100097
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DAN PELAYANAN PARKIR
TERHADAP KINERJA BADAN PENGELOLA
PERPARKIRAN DI KECAMATAN MEDAN
HELVETIA

MEDAN, APRIL 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si)



(Yanita Sari Rioni, SE.,M.Si.,Ak)

PEMBIMBING I

(Drs. Nadjib. Ak. MM.CA)

PEMBIMBING II

(Yanita Sari Rioni, SE.,M.Si.,Ak)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN LAIN

NAMA : FRISKA MARPAUNG
NPM : 1415100097
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DAN PELAYANAN PARKIR
TERHADAP KINERJA BADAN PENGELOLA
PERPARKIRAN DI KECAMATAN MEDAN
HELVETIA

MEDAN, APRIL 2019

KETUA



(Anggi Pratomo Nasution, SE, M.Si)

ANGGOTA II

(Vania Sari Rioni, SE, M.Si, Ak)

ANGGOTA I

(Drs. Nadjib. Ak. MM, CA)

ANGGOTA III

(Hernawaty, SE, MM)

ANGGOTA IV

(Pipit Buana Sari, SE, MM)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FRISKA MARPAUNG
NPM : 1415100097
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
JudulSkripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DAN PELAYANAN PARKIR
TERHADAP KINERJA BADAN
PENGELOLA PERPARKIRAN DI
KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2019



Friska Marpaung

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FRISKA MARPAUNG
Tempat/Tanggal lahir : Silaen, 24 Februari 1996
NPM : 1415100097
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Lembaga Pemasarakatan Gang. Sepakat No. 06
Tanjung Gusta, Medan.

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Univeristas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini, saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2019
Penulis



Friska Marpaung



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FRISKA MARPAUNG
Tgl. Lahir : SILAEN / 24 Februari 1996
No. Pokok Mahasiswa : 1415100097
Jurusan : Akuntansi
Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik
Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.45
Saya mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi

Persetujuan

Pengaruh Kualitas Pelayanan, Tarif Retribusi Sampah, Kemampuan Membayar Terhadap Penerimaan Retribusi Sampah di Kota Medan.	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir, Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Pada Penyelenggaraan Parkir di Pinggir Jalan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir.	<input type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi dibertindak sendiri



(Ir. Bhakti Anansyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 20 Oktober 2017

Permohonan,

(FRISKA MARPAUNG)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Drs. Anwar Sanusi, M.Si.)

Tanggal : 20 Oktober 2017
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
10
(Drs. Nadzib Akbar, CA.)

Tanggal : 29 OKTOBER 2017
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Yudianto, SE, M.Si, M2)

Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Jumat, 20 Oktober 2017 09:03:13

28

01 OCT 2018

FM-BPAA-2017-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 29 September 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRISKA MARPAUNG
Tempat/Tgl. Lahir : / 24 Februari 1996
Nama Orang Tua : ROBERT MARPAUNG
K. P. M : 1415100097
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085275942234
Alamat : DUSUN IV JL.L.PEMASYARAKATAN GG.SEPAKAT

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.,
Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tertampir foto copy STTB SLTA dlegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam M&P
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian diraksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
	Rp.	2.500.000
	Rp.	4.600.000

Disetujui oleh :



Hormat saya

FRISKA MARPAUNG
1415100097

Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :

- Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
- Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ast) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

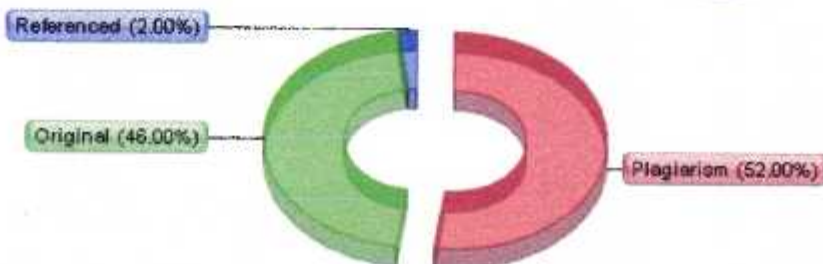
Analyzed document: 29-09-18 10:47:19 AM

"FRISKA MARPAUNG_1415100097_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

wrds: 15814	https://id.123dok.com/document/9yn8roly-peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-kuall...
wrds: 15814	https://id.123dok.com/document/9yn8roly-peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-kuall...
wrds: 13072	https://text-id.123dok.com/document/wye9ereq-sistem-akuntansi-penerifmaan-dan-pengeluaran-k...

Other Sources:]

Processed resources details:

294 - Ok / 56 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpeb@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Najib. Ak. MM. CA
 Dosen Pembimbing II : YUNITA Sari Rioni SE. MSi
 Nama Mahasiswa : FRISKA MARPAUNG
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100097
 Bidang Pendidikan : SA
 Nama Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN PELAYANAN
 PARKIR TERHADAP KINERJA BADAN PENGELOLA PERPARKIRAN
 DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p>Parkir dikelola oleh Badan Pengelola Perparkiran atau oleh Dinas Perhubungan ? Bertanya kembali ! 20/9/2018</p> <p>22/9/2018</p>		

*revisi
 noja kurni*

Medan, 10 September 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Nadjib, AK.MM.CA
 Dosen Pembimbing II : Tumita Sari Rioni, SE.MSi
 Nama Mahasiswa : FRISKA MARPAUNG
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100097
 Bidang Pendidikan : SA
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DAN PELAYANAN
PARKIR TERHADAP KINERJA BADAN PENGELOLA PERPARKIRAN
DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
28/09/18	- Perbaiki abstrak (tidak ada garis) - Perbaiki tabel - Penulisan rumus dibuat tabel	YSR	—
29/09/18	ACC MESA ATJAW	YSR	—

Medan, 10 September 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parker terhadap kinerja badan pengelolaan perparkiran di kecamatan Medan Helvetia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Medan, terlebih dalam meningkatkan retribusi parkir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, dan menyebarkan kuesioner. Data-data tersebut akan dianalisis secara asosiatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perparkiran, pelayanan parkir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perparkiran. Pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir berpengaruh secara simultan terhadap kinerja badan pengelola perparkiran.

Kata kunci :Pemungutan Retribusi Parkir, Pelayanan Parkir

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of collection of parking fees and parking services on the performance of parking management bodies in Medan Helvetia sub-district. This research is expected to be an input for the Medan City Transportation Agency, especially in increasing parking fees. This type of research uses associative research. Data collection is done by library research and field research using observation, and distributing questionnaires. These data will be analyzed associatively. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the collection of parking fees has a partial effect on the performance of the parking management body, parking services have a partial effect on the performance of the parking management body. Collection of parking fees and parking services simultaneously affects the performance of the parking management body.

Keywords: Collection of Parking Retribution, Parking Service

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran Di Kecamatan Medan Helvetia”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat datasi penulis berkata dan ya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Nadjib Ak.,M.M. CA selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah memberikan kritik, saran serta masukan terhadap perbaikan skripsi saya.
5. IbuYunita Sari Rioni. SE, M.Si.,Ak selaku dosen pembimbing II (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi saya.

6. Seluruh dosen pengajar, staf Fakultas Sosial Sains beserta staf akademik dan keuangan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang turut membantu memberikan kemudahan bagi saya.
7. Terkhusus Bapak dan Mamakku tercinta, Robert Marpaung dan Parasian Panjaitan yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan yang terbaik bagiku dan memberikan semangat yang tiada hentinya.
8. Amang Boru dan Namboruku tersayang, Sumihar Siagian, SE dan Risma Marpaung yang tak bosan-bosannya memberikan motivasi dalam hidupku, dan selalu memberikan dukungan untuk pantang menyerah.
9. Adek-adekku termanis, Novia Marpaung, GunawanMarpaung, Ester Ayu Marpaung, Indra James Marpaung dan si kecil NatasyaMarpaung yang selalu memberikan dukungan supaya tidak menyerah dan terus melangkah maju.
10. Pariban dan Eda kesayangan, Suhendri Midian Siagian, HertaSiagian dan Valentina Siagian yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam bentuk apapun.
11. Bapak/Ibu Manager/Pimpinan Kantor Dinas Perhubungan telah banyak membantu dan memberikan kemudahan bagi saya.
12. Sahabatku terfavorit Bastian Jose Wandry Habeahan, S.Pd, Bintang Ruth Olivia Hutajulu, Amd, Surya Ananda Sitohang Amd, Fitri Rahmadani, Nia Aulia Lubis, Nurbaidah Hanum, Syahna Zatira, Anisa Apriani, Zulham Munte, Muazzinah, Mayawi Islami, Intan Zai, Sri Kanti, Andriyani Safitri, Saleh, Yoe.

13. Teman Senior, seangkatan dan adik-adik stambuk di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang banyak memberikan motivasi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Medan, April 2019

Penulis,

FRISKA MARPAUNG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan teori	8
1. Pengertian Pemungutan	8
2. Retribusi	8
a. Pengertian Retribusi Daerah	8
b. Ciri-Ciri Pokok Retribusi	11
c. Jenis Retribusi	12
3. Retribusi Parkir	15
Pengertian Retribusi Parkir	16
4. Pemungutan Retribusi Parkir	17
a. Pengertian Pemungutan Retribusi parkir	17
b. Tata Cara Pemungutan Retribusi parkir	18
5. Pelayanan Parkir	19
6. Kinerja	20
a. Pengukuran Kineja	21
b. Tujuan Pengukuran Kinerja	21
B. PenelitianTerdahulu	22
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	28

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota medan	36
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	36
a. Strukur Organisasi	36
b. Pembagian Tugas	38
3. Deskripsi Karakteristik Responden	65
a. Berdasarkan Jenis Kelamin	66
b. Berdasarkan Pendidikan	67
c. Berdasarkan Jenis Pekerjaan	68
d. Berdasarkan Usia Responden	69
4. Deskripsi variabel Penelitian	69
5. Deskripsi Analisa Data	71
a. Pengujian Kualitas Data	71
1. Uji Validitas	71
2. Uji Reliabilitas	72
b. Pengujian Asumsi Klasik	73
1. Uji Normalitas	74
2. Uji Heteroskedastisitas	75
3. Uji Multikolonieritas	76
c. Pengujian Hipotesis	77
1. Uji F	77
2. Uji t	78
3. Koefisien Determinasi	80
B. Pembahasan	81
a. Teori	81
b. Penelitian Terdahulu	82
c. Hasil Penelitian	82

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian	27
Tabel 3.2 Operasional Variabel	30
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	68
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden	69
Tabel 4.5 Skala Likert	70
Tabel 4.6 Uji Validitas	71
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data	74
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	77
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)	78
Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	79
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi	80
Tabel 4.13 Hasil Penelitian	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	37
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	75
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini semakin maju dan kompleks sehingga berimbas pada semua bidang kehidupan, tidak terkecuali pertumbuhan penduduk terutama di daerah perkotaan. Sejalan dengan hal ini akan memacu peningkatan aktifitas penduduk. Dengan demikian keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas ini akan menjadi sebuah kebutuhan. Jalan raya merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang mempercepat pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta membuka hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antar daerah.

Transportasi adalah suatu kebutuhan turunan (*derived demand*). Artinya, seseorang tidak akan melakukan perjalanan kecuali akibat adanya kebutuhan untuk melakukan aktifitas di tempat berbeda dengan tempat yang bersangkutan berada, aktifitas yang dimaksudkan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat secara sempurna dijalankan. Dengan demikian jelaslah bahwa transportasi bukanlah tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraanya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parker ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit.

Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk kendaraan bermotor yang kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan sebagai tempat parkir. Dengan dihidirkannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan keadaan semrawut (Natapraja Vol. 4 No. 2 Desember 2016).

Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu mengakibatkan terhambatnya arus jalan lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Pengendalian parkir di Kecamatan Medan Helvetia merupakan hal yang paling penting untuk dikendalikan agar kemacetan, polusi, dan kebisingan dapat diminimalisir.

Dalam rangka pencapaian pemungutan retribusi parker secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus mampu menciptakan dan mendorong pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang akan meningkatkan kinerja badan pengelola perparkiran.

Pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Medan Helvetia adalah salah satu dari perparkiran otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Perparkiran merupakan bagian dari sub system lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka

meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Masalah perparkiran sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang beraktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan akibat kapasitas lahan parkir yang tersedia tidak dapat lagi menampung jumlah kendaraan yang akan parkir di area tersebut.

Dalam rangka pencapaian pelayanan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya kinerja badan pengelola perparkiran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran Di Kecamatan Medan Helvetia”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parker sebagai berikut :

- a. Parkir Liar : adanya kegiatan parkir di tempat yang seharusnya tidak ada kegiatan parkir.
- b. Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir : pengawasan dalam pemungutan retribusi parker adalah hal yang sangat penting sekali

dilakukan untuk mengurangi resiko adanya penyelewengan yang dilakukan petugas di lapangan.

- c. Juru Parkir Liar : adanya juru parkir liar yang tidak melakukan penyetoran retribusi parkir.

Kurangnya pengendalian dari badan pengelola perparkiran di kecamatan Medan Helvetia terhadap kinerja pegawai di lapangan dalam proses pemungutan retribusi parkir di lapangan

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada retribusi pelayanan parkir di Kecamatan Medan Helvetia. Karena menjadi pusat keramaian masuk dalam wilayah Kecamatan Medan Helvetia, dan sebagai tempat yang menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia, yang ramai dikunjungi baik siang maupun sore hari. Jadi, peneliti hanya fokus pada pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Medan Helvetia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemungutan retribusi parker berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perpajakan di Kecamatan Medan Helvetia?
2. Apakah pelayanan parker berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perpajakan di Kecamatan Medan Helvetia?
3. Apakah pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir secara simultan terhadap kinerja badan pengelola perpajakan di Kecamatan Medan Helvetia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan retribusi parker terhadap kinerja badan pengelola perpajakan di Kecamatan Medan Helvetia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan parker terhadap kinerja badan pengelola perpajakan di Kecamatan Medan Helvetia
- c. Untuk mengetahui apakah pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parker berpengaruh terhadap kinerja badan pengelola perpajakan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir Terhadap kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.
- b. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang yang sama.
- c. Bagi pihak instansi terkait diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atas pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir di Kecamatan Medan Helvetia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu Jufrizen (2013) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan”. Sedangkan Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran Di Kecamatan Medan Helvetia”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Perbedaan Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Variabel Penelitian	Penelitian terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel yaitu potensi penerimaan retribusi parkir.	Penelitian sekarang menggunakan 2 (dua) variable independen yaitu pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir dan 1 (satu) variable dependen yaitu kinerja badan pengelola perparkiran.
2	Waktu Penelitian	Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013.	Penelitian sekarang dilakukan tahun 2018.
3	Lokasi Penelitian	Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Medan Kota.	Penelitian sekarang dilaksanakan di Kecamatan Medan Helvetia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

2. Retribusi

a. Pengertian Retribusi Daerah

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pajak dan retribusi daerah telah dipungut sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat diandalkan daerah. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah

menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Latar belakang reformasi pajak dan retribusi daerah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan politik, ekonomi, social dan budaya. Penggantian Undang-Undang Pajak retribusi Daerah terus dilakukan mulai dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sampai sekarang.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan Retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.

Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Tingkat penggunaan jasa menurut Zuraida (2012:196) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Menurut Siahaan (2013 : 6) Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Adapun pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah ialah suatu pungutan atas dasar jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi dalam pungutan retribusi daerah ini pemerintah daerah menyediakan atau memberikan jasa atau perizinan tertentu kepada masyarakat, kemudian atas jasa atau perizinan tertentu itu, masyarakat membayar pungutan.

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan jasa tertentu.

b. Ciri-Ciri Pokok Retribusi

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah :

- 1) Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.

- 2) Wewenang atas pungutan retribusi adalah pemerintah daerah.
- 3) Dalam pungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 4) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

c. Jenis Retribusi

Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

1. Retribusi Jasa Umum.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, ditentukan berdasarkan criteria berikut ini :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Pengertian

harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (*current asset*).

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Pasar dan atau pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan criteria berikut ini :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Adapun umumnya subjek dari Retribusi Parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari Retribusi Parkir adalah pelayanan penyediaan Parkir ditepi jalan umum.

3. Retribusi Parkir

Pengertian Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perparkiran dikatakan bahwa : Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara yang ditinggalkan pengemudi. Definisi lain tentang Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka

waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Dari kedua pengertian diatas dapat di katakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan”. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemungutan Retribusi Parkir

a. Pengertian Pemungutan Retribusi parkir

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan

jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, Penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki olehn egara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

b. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. Pelayanan Parkir

Beberapa tokoh telah mengemukakan pendapatnya mengenai teori pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat (LAN, 2006).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa “pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Berdasarkan Keputusan menpan Nomor 63 Tahun 2004 yang menyatakan asas-asas pelayanan sebagai berikut :

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan peneriman pelayanan dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

6. Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Beberapa definisi kinerja dari tokoh antara lain:

- a. Menurut Mahsun (2012:81) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*.

- b. Menurut Sembiring (2012:82) kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber daya, data dan informal, kebijakan, dan waktu tertentu yang digunakan disebut sebagai masukan.

Dari berbagai definisi diatas peneliti menyimpulkan kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya.

a. Pengukuran Kinerja

Hasil akhir pengukuran kinerja adalah informasi tentang kinerja, apakah kinerja individu, kinerja kelompok atau unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kejelasan informasi tentang hal-hal yang akan diukur baik bagi individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan, haruslah menjadi kesepakatan bersama, maka dengan demikian hal itu berpengaruh pada motivasi, sikap, dan perilaku setiap anggota organisasi, selanjutnya hal tersebut berdampak pada kinerja organisasi.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja menurut Mahsun (2012:85) mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.

2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
4. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
5. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
6. Memperbaiki pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan
7. Memotivasi pegawai.
8. Menciptakan akuntabilitas publik.

B. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis telah memiliki beberapa penelitian terdahulu yang telah dijadikan referensi dalam penulisan skripsi.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model analisis	Hasil penelitian
1	Jufrizen (2013) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan	Potensi	Penerimaan RetribusiP arkir	Analisis deskriptif kualitatif	Adapun hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.
2	Suhartini (2014) Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau	Analisis Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singing	Pemungutan	Retribusi parkir	Analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Sarana dan prasarana

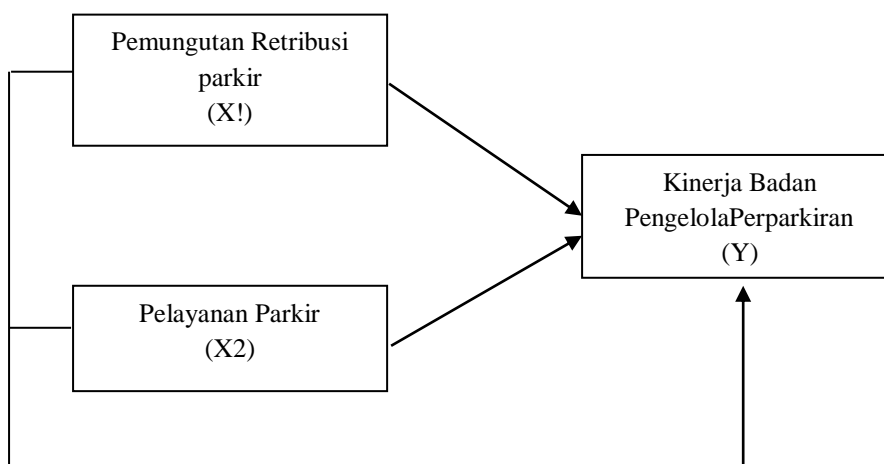
No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model analisis	Hasil penelitian
						Belum memadai, besarnya tarif yang sudah di pungut sudah sesuai dengan PERDA Nomor 6 Tahun 2012. Target Realisasi dari Tahun 2009 sampai dengan 2012 tidak pernah tercapai yang diakibatkan oleh system manajemen pengelolaan yang kurangbaik, system pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal
3	Sarwo Budiarto (2016) Universitas Mulawarman	Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusi ya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Pemungutan , Retribusi Parkir, Kontribusi	Pendapatan Asli Daerah	Analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Sistem Pemungutan Retribusi Parkir, Sistem Pemberian izin lahan parkir, Model-model pemungutan retribusi parkir, dan Sistem Bagi hasil retribusi parker masih belum berjalan dengan baik dan masih bertolak belakang dengan peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sehingga belum dapat Berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Namun dalam Sistem Pemungutan Retribusi Parkir terdapat beberapa hambatan hambatan yang dihadapi oleh UPTD Parkir diantaranya masih banyaknya Penguasaan pada tempat-tempat

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
						Lokasi tertentu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menyulitkan UPTD Parkir dalam hal pembinaan.
4	Yoan Santosa Putra (2015) Universitas Kanjuruhan Malang	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa parkir (Studi Pada Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)	Kualitas pelayanan	Kepuasan pelanggan pengguna asaparkir	Analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kehandalan (reliability), jaminan (assurance), dan empati (empathy), berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui uji t, sedangkan variable fisik (tangible) dan daya tanggap (responsiveness) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang berpengaruh dominan adalah kehandalan (reliability).

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan tentang alur berfikir dan hubungan yang menunjukkan kaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel bebas yaitu pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kinerja Badan Pengelola Perparkiran.

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : diolah Penulis (2018)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari atas akar “*hypo* dan *thesis*”. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* berarti pendapat. Menurut Sugiyono (2014 : 132) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Sedangkan hipotesis menurut Dantes (2012) diartikan sebagai praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pemungutan retribusi parker mempengaruhi kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.
2. Pelayanan parker mempengaruhi kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.

3. Pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir mempengaruhi kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini membahas dua variabel yaitu pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 3.1

Jadwal Rencana Penelitian

No	Kegiatan	2017		2018					2019
		Okt	Nov	Des - Mar	Apr	Jul	Ags	Sep	Mar
1	Pengajuan Proposal	■							
2	Penulisan Proposal		■						
3	Bimbingan Proposal		■	■					
4	Seminar Proposal				■				
5	Pengolahan Data					■			
6	Analisis dan					■			

	Evaluasi Data								
7	Penulisan Skripsi								
8	Bimbingan Skripsi								
9	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Penulis (2018)

C. Populasi dan Sampel/Jenis Dan Sumber data

1. Populasi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2016 : 4) dikutip dari bukunya yang berjudul Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola parkir di Kecamatan Medan Helvetia.

Menurut Dantes (2012 : 37) populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria tertentu, yang ditentukan peneliti. Jadi, populasi dapat disimpulkan sebagai subjek penelitian yang dapat ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa parkir di Kecamatan Medan Helvetia.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016 : 81) mendefinisikan sampel adalah sebagai berikut: "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili)".

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 40 orang masyarakat pengguna jalan di Kecamatan Medan Helvetia.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yaitu : Pegawai Dinas Perhubungan dan Masyarakat pengguna pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai objek penelitian.

b. Data sekunder terdiri dari :

Seperti peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang, Peraturan daerah dan lainnya.

D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

1. Variabel penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu, pemungutan retribusi parkir (X1), pelayanan parkir (X2) dan kinerja badan pengelola perparkiran (Y).

2. Definisi Operasional

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Pemungutan Retribusi parkir (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Parkir 2. Juru Parkir 3. Pengawas Parkir 	Pengawasan setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (Adisasmita, 2014 : 126)	Skala Likert
Pelayanan parkir (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar pelayanan 2) Pemahaman terhadap keinginan pelanggan 3) Pelayanan sesuai harapan petugas 	Faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan di mana kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen dan sebagai strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan Menurut Tjiptono dalam Aditya (2011:23)	Skala Likert
Kinerja Badan Pengelola Perparkiran (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi kerja 2. Kualitas layanan 	Menggunakan penilaian prestasi kerja bagi karyawan sebagai acuan atau standar di dalam membuat keputusan yang berkenaan dengan kondisi kerja karyawan (Gomez dalam buku Suwanto dan Donni 2011:195).	Skala Likert

Sumber: Penulis (2018)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner atau Angket

Teknik Angket, merupakan melakukan penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang langsung diisi oleh responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner dibagikan kepada pengguna jasa parkir di Kecamatan Medan Helvetia.

2. Teknik Studi Literatur

Pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari teori-teori dan literatur-literatur dan berasal dari buku-buku literature serta bacaan lain yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Kualitas Data

Dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner membutuhkan kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan dan factor situasional merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengukur kecerdasan instrument. Uji validitas tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Suatu kuesioner

dikatakan valid jika suatu pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).

Menurut Sugiyono (2012 : 133) bahwa pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan syarat minimum $r = 0,3$ maka item pernyataan dikatakan valid dan dapat diukur.

Perhitungan yang akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statiscal Package for Social Science*). Dimana validitas data diukur dengan membandingkan r hitung dan r tabel, jika :

1. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada tarafsignifikan 5%), maka dapat dikatakan kuesioner tersebut valid.
2. Apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pada tarafsignifikan 5%), maka dapat dikatakan kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, dan kuesioner dikatakan *reliable* bila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut harus konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Reliabilitas menunjukkan sejauhmana tingkat kekonsistenan pengukuran dari suatu responden yang lain atau dengan kata lain sejauhmana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk menguji

reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach* dengan bantuan software SPSS 22.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Pengujian data dapat dilakukan dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal. Untuk mengetahui pedoman dalam pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau yang merupakan distribusi normal dapat dilihat dari nilai signifikan atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal dan sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011: 139) bahwa tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai *error* nya).

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah “variabel bebas yang nilai korelasi sesama variabel bebas sama dengan nol”.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individu variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variable independen.

Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (Karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,01$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah merupakan keadaan pernyataan yang akan diuji kebenarannya menggunakan data/informasi yang di kumpulkan melalui sampel.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012 :278) “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengancara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Adapun Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji t

Uji t (Uji Parsial) digunakan untuk variable independen secara individu berpengaruh terhadap variable dependen. Adapun criteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variable independen dengan variable dependen.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen. Menurut Ghozali (2011: 98), “Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka menunjukkan bahwa variable independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variable dependen. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variable independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variable dependen”.

4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variable dependen amat terbatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

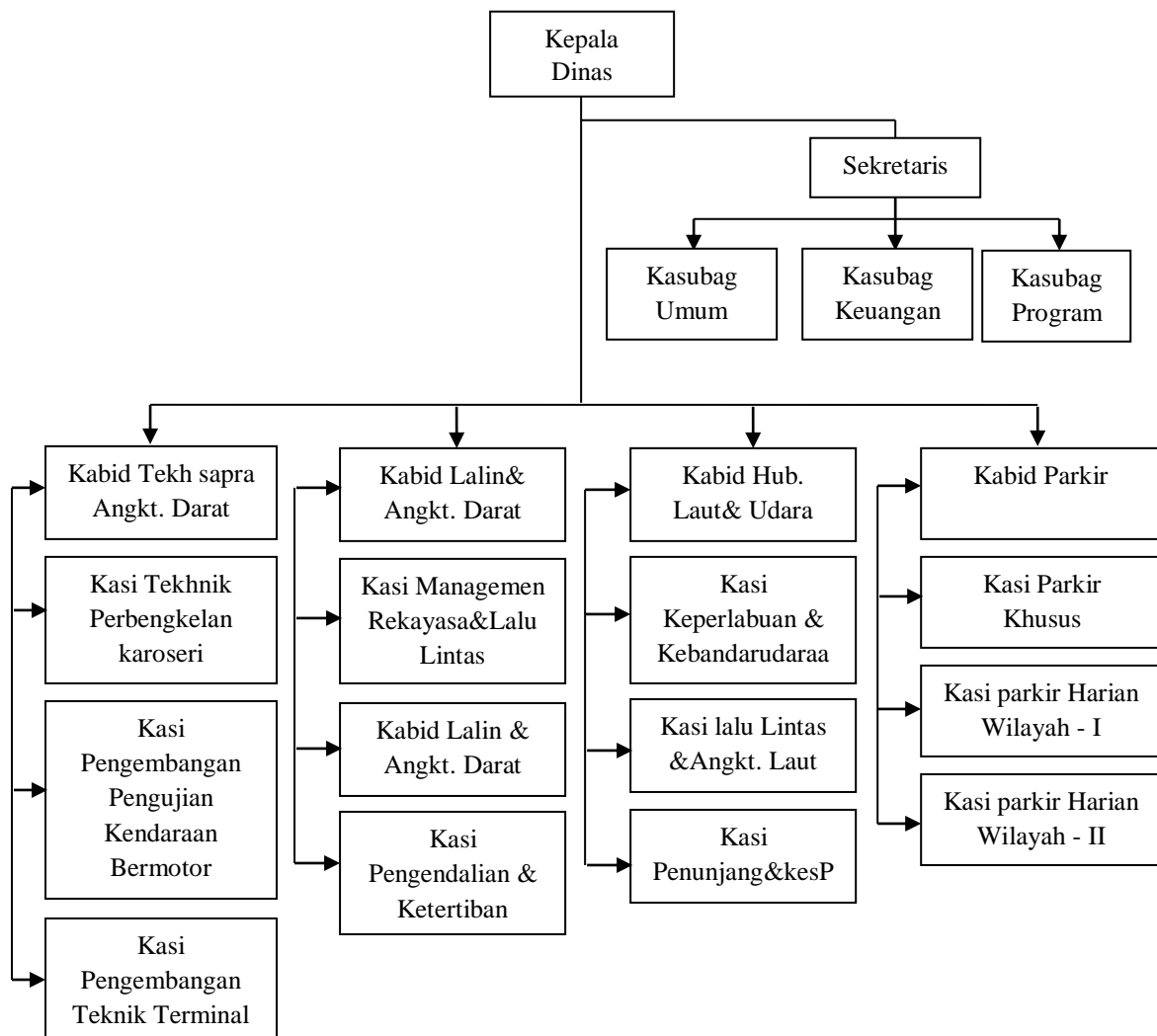
Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggungjawab secara sistematis dan menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antar setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui struktur organisasi.



Sumber :Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

b. Pembagian Tugas

Berikut ini adalah Uraian Tugas (*Job Description*) dari setiap unit pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang terdiri dari :

Kepala Dinas

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

2. Tujuan Jabatan

Menyelenggarakan pelaksanaan fungsi perhubungan di bidang, perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan perizinan bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
 - a. Mengidentifikasi, menemukenali, serta memahami system transportasi kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.
 - b. Menyusun siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota.
 - c. Menyampaikan rancangan siklus perencanaan dan penganggaran bidang perhubungan kota kepada walikota Medan melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai pola kebijakan transportasi berkelanjutan di Kota Medan.

- d. Mengidentifikasi, mendisposisi dan menugaskan tindak lanjut surat-surat masuk kepada bawahan.
 - e. Memeriksa konsep surat tindak lanjut yang disampaikan bawahan.
 - f. Menyetujui, menandatangani, dan atau membuat catatan-catatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
 - a. Mengidentifikasi, menyusun dan mengagendakan rapat-rapat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana kebijakan system transportasi.
 - b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta implementasi kebijakan transportasi perkotaan yang diselenggarakan.
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi bakortib lalu lintas kota Medan.
 - d. Mendorong pelaksanaan pelayanan dan perizinan di bidang perhubungan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
 - a. Mengidentifikasi dan menemukani kebutuhan keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan didalam pelaksanaan kebijakan transportasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan, mengikuti diklat peningkatan kemampuan khusus *stakeholder* perhubungan.
 - c. Melakukan bimbingan kepada bawahan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

- d. Melaksanakan fungsi *reward* dan *punishment*.
 - e. Menetapkan jenis-jenis kebijakan transportasi yang akan dilaksanakan dan yang akan disusun.
 - f. Memberikan arahan proses penyelenggaraan perhubungan dan pelayanan perizinan di bidang perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota Medan secara tertulis.
 - b. Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota Medan.
 - c. Merumuskan tindak lanjut tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d. Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut.
 - e. Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapatkan perbaikan kembali dari pelaksanaan.
 - f. Meneruskan saran tindak lanjut kepada walikota Medan untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan.
 - g. Melaksanakan tindak lanjut sesuai tupoksi Dinas Perhubungan.

Sekretaris

1. Ikhtisar Jabatan

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum, keuangan dan penyusunan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dilingkungan SKPD.

2. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Kesekretariatan yaitu :
 - a. Mengumpulkan dan menyusun data/informasi relevan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
 - b. Mempelajari dasar – dasar regulasi penyelenggaraan tugas – tugas administrasi, keuangan dan penyusunan program.
 - c. Merumuskan kebutuhan prasarana sarana pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan penyusunan program.
 - d. Menyusun rencana kerja tahunan kesekretariatan
 - e. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor
 - f. Menyampaikan rancangan rencana kerja kesekretariatan kepada atasan langsung untuk mendapat koreksi dan atau persetujuan
2. Pengkoordinasian Penyusunan Perencanaan Program SKPD yaitu :
 - a. Menginventarisir materi dan jadwal rapat – rapat koordinasi penyusunan program SKPD.
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan rapat – rapat koordinasi penyusunan program SKPD yang diperlukan.
 - c. Merumuskan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program

SKPD.

- d. Menyampaikan rumusan rekomendasi rapat-rapat koordinasi penyusunan program kepada atasan.
 - e. Mendistribusikan hasil-hasil rapat koordinasi penyusunan program kepada unit kerja yang ada di lingkungan SKPD berdasarkan persetujuan atasan.
 - f. Meminta usulan program kerja dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan SKPD.
 - g. Melaksanakan rekapitulasi usulan program kerja dari masing-masing unit kerja menjadi rencana kerja SKPD.
 - h. Menyampaikan rancangan rencana kerja SKPD kepada atasan untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan lebih lanjut.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretarian yang meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Kerumahtanggaan SKPD.
 4. Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan yaitu :merumuskan rencana pengembangan sumber daya aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta meneruskan kepada atasan untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Kasubag Umum

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Sekretariat yaitu:

di bidang administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian dalam rangka mendukung tugas-tugas SKPD.

2. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi umum; kebutuhan prasarana dan sarana kantor; administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan serta kerumahtanggaan SKPD.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penysuunan Rencana Program dan kegiatan Sub BagianUmum yaitu :
 - a. Mengidentifikasi dan mengenali tugas – tugas Sub. Bagian Umum.
 - b. Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub.Bagian Umum dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan.
 - c. Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub. Bagian Umum.
 - d. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
 - e. Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub BagianUmum.
 - f. Membimbing unsure staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub BagianUmum.
2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas; penataan kearsipan; perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan SKPD yaitu:

- a. Menugaskan piñata usahaan surat masuk dan surat keluar.
- b. Mempersiapkan isi ringkas surat masuk pada lembar disposisi.
- c. Mengajukan surat masuk kepada atasan untuk diteruskan kepada pimpinan SKPD.
- d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit kerja yang ditujukan dalam disposisi atasan.
- e. Mempersiapkan tindak lanjut konsep surat yang ditugaskan atasan dan mengajukan kepada atasan.
- f. Mendistribusikan surat keluar kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan surat,
- g. Mengumpulkan arsip dan dokumen yang diperlukan kembali baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diteruskan kepada atasan atau unit SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian

- a. Melakukan pencatatan atas kebutuhan pembinaan kepegawaian seperti jadwal kenaikan pangkat regular dan pilihan dan sebagainya.
- b. Menginformasikan hak dan kewajiban kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD.
- c. Mempersiapkan konsep surat-surat kepegawaian yang diperlukan; memaraf dan mengajukan kepada atasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan seperti permohonan perpanjangan pension; pengaktifan cuti; permohonan izin perceraian dan beristri lebihdari 1 (satu) orang, penugasan pegawai dan lain-lain.

4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
 - a. Mengumpulkan bahan-bahan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
 - c. Mempersiapkan rancangan rencana pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian untuk selanjutnya diajukan kepada atasan.
5. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yaitu:
 - a. Mempersiapkan rencana peningkatan motivasi dan prestasi kerja pegawai dan mengajukan kepada atasan.
 - b. Memantau pelaksanaan penegakan disiplin pegawai dan melaporkannya secara regular kepada atasan.
 - c. Mempersiapkan rancangan konsep surat hukuman terhadap pelanggaran disiplin yang diminta atasan dan mengajukannya kepada atasan.
6. Penyiapan bahan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yaitu:
 - a. Menyiapkan rancangan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kesekretarisan dan penyampaiannya kepada atasan.
 - b. Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan peningkatan motivasi dan prestasi kerja di unit kerja kesekretarisan dan mengajukannya kepada atasan.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:
 - a. Menerima dan mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - b. Menyiapkan tindak lanjut pengorganisasian dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
 - c. Memantau pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas SKPD.

2. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan administrasi keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - a. Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub Bagian Keuangan.
 - b. Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub Bagian Keuangan dan mengajukan kepada atasan tanggapan dan persetujuan.
 - c. Melaksanakan rencana kerja tahunan sub bagian keuangan.

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
 - a. Mengumpulkan serta mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Keuangan.
 - b. Membimbing unsure staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaran tugas-tugas Sub Bagian Keuangan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemorosesan, pengusulan dan verifikasi.
 - a. Menugaskan penatausahaan administrasi keuangan.
 - b. Mempersiapkan administrasi/registrasi SP2D.
 - c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh PPTK SKPD.
 - d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - e. Melakukan verifikasi.
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
5. Penyusunan laporan keuangan.
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 - a. Melaksanakan akuntansi SKPD.
 - b. Memverifikasi harian atas penerimaan.

7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kasubbag Penyusunan Program

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian tugas secretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan SKPD.

2. Tujuan Jabatan

Melaksanakan tugas penyusunan rencana program kegiatan dinas, evaluasi dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program.
 - a. Mengidentifikasi dan mengenali tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Mempersiapkan rencana kerja tahunan Sub Bagian Penyusunan Program dan mengajukannya kepada atasan untuk mendapat tanggapan dan persetujuan.
 - c. Melaksanakan rencana kerja tahunan Sub bagian Penyusunan Program.

2. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas.
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Membimbing unsure staf untuk memahami pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dinas.
 - a. Mempersiapkan rencana dan program tahunan dari masing-masing bidang (Sekretaris, Bidang Dinas) dan Sub Bidang (Kasubag/Kasi, Ks. UPTD).
 - b. Mempersiapkan Bahan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun yang berasal dari usulan dan masukan Bidang/Sub Bidang Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - c. Mengumpulkan usulan dan masukan dari hasil Musrenbang untuk disusun dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - d. Mempersiapkan Bahan RKA SKPD Dinas Perhubungan yang berasal dari masukan/usulan hasil musrenbang dan usulan Dinas Perhubungan yang berasal dari Bidang dan Sub Bidang Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - e. Berkoordinasi dengan Bappeda Kota Medan untuk menyusun KUA PPAS Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

- a. Mempersiapkan laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dihimpun dari bidang/sub bidang dinas
 - b. Mempersiapkan koreksi dan masukan kepada Sekretaris terhadap tugas/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan dinas yang ditampung dalam DPA SKPD Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Penyiapan bahan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- a. Mempersiapkan bahan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas ke Sekretariat Kota Medan secara Triwulan setiap tahun.
 - b. Mempersiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan setiap tahun.
 - c. Membuat laporan tertulis kepada Sekretaris terhadap kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan/belum dilaksanakan oleh bidang/sub bidang.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat

1. Ikhtisar Jabatan

Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas lingkup teknik perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian bermotor dan pengembangant eknik terminal.

2. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan proses pemberian surat izin gangguan bukan

industri dan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat yaitu:
 - a. Mengumpulkan dan menyusun informasi/data sebagai bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang teknik dan sarana prasarana angkutan darat.
 - b. Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas di bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - c. Merumuskan kebutuhan dan dukungan sarana prasarana penyusunan program kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
 - d. Menyusun rencana kerja tahunan bidang teknik sarana dan prasarana angkutan darat.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor, dan pengembangan teknik terminal yaitu:
 1. Mengumpulkan dan mempelajari pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan tugas-tugas teknik sarana dan prasarana angkutan darat lingkup perbengkelan karoseri, pengembangan teknik pengujian kendaraan bermotor dan pengembangan teknik terminal.
 2. Membimbing unsure staf untuk memahami pedoman pelaksanaan.

3. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup bengkel umum kendaraan bermotor, usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan proses perizinan izin gangguan bukan industri lingkup usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - b. Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meninjau, meneliti, mengukur objek usaha lingkup usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - c. Memantau penyelenggaraan pelayanan proses perizinan.
 - d. Mendandatangani daftar perincian retribusi izin gangguan bukan industri.
4. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan terminal yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di terminal.
 - b. Menugaskan kepada seksi sebagai pelaksana untuk meneliti, memeriksa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
 - c. Memantau penyelenggara pelayanan kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal yang bukan unit pelaksana teknis (UPT).
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkup bidang sarana dan prasarana angkutan darat.
7. Penyiapan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang sarana

dan prasarana angkutan darat.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang lalu lintas dan angkutan darat di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Tujuan Jabatan

Menyediakan pelayanan dan administrasi serta penyediaan data dan informasi dan bahan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan dan program dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban yaitu:
 - a. Mengumpulkan dan menyusun data/informasi yang relevan sebagai bahan penyusun rencana kegiatan dan program di Bidang lalu Lintas dan Angkutan Darat.
 - b. Mempelajari dasar-dasar regulasi penyelenggaraan tugas-tugas Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan

- pengendalian dan Ketertiban.
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan lalu lintas.
 - d. Menyusun dan merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan Angkutan Darat, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Pengendalian dan Ketertiban
 - e. Penyusunan rencana umum jaringan transportasi jalan Kota Medan.
2. Pelaksanaan proses dan pelayanan perizinan angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban yaitu:
- a. Pelaksanaan proses perizinan dan pelayanan lainnya lingkup lalu lintas dan angkutan kota meliputi izin trayek angkutan, operasi angkutan taksi, usaha angkutan pariwisata, usaha angkutan barang dan lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan kota.
 - b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari aspek pengadaan sarana dan prasarana.
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian lingkup lalu lintas dan angkutan darat.
3. Pelaksanaan evaluasi penyusunan rencana kerja, pelayanan serta pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan darat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pengendalian dan ketertiban.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya yaitu:
- a. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- b. Merumuskan tindak lanjut dari tugas-tugas yang diberikan.
- c. Menugaskan pelaksana untuk mempersiapkan rumusan tindak lanjut.
- d. Memeriksa konsep bahan tindak lanjut sekaligus menyetujuinya dan atau membuat catatan-catatan penyempurnaan untuk mendapatkan perbaikan kembali dari pelaksana.
- e. Meneruskan saran tindak lanjut kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan tanggapan atau persetujuan.

Kepala Seksi Angkutan Darat

Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Angkutan Umum, dalam upaya memenuhi kebutuhan dan ketersediaan angkutan dari sisi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yaitu :
 - a. Pembinaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek/angkutan Kota, seperti pengaturan rute dan pengaturan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang/pangkalan.
 - b. Pembinaan terhadap angkutan orang dan barang di wilayah kota dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun

dengan kendaraan tidak bermotor yaitu: pembatasan wilayah operasional angkutan beca bermotor maupun tidak bermotor dan pembatasan wilayah operasional angkutan berat.

- c. Pembinaan angkutan barang yang menggunakan kendaraan bermotor umum/tidak umum yaitu: sepeda motor. Mobil barang, kendaraan tidak bermotor.
- d. Penetapan jaringan trayek kota dan kebutuhan kendaraan bermotor umum berdasarkan: tata ruang wilayah, permintaan jasa angkutan, ketersediaan jaringan lalu lintas dan keterpaduan moda angkutan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan menyelenggarakan tugas-tugas penyiapan rencana, program, menyusun bahan petunjuk teknis, mengumpulkan, mengelola data lingkup pengendalian dan ketertiban dan penyiapan bahan data proses perizinan penggunaan jalan serta *monitoring* dan evaluasi.

2. Tujuan Jabatan

Membantu tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan dalam hal menyediakan pelayanan lingkup pengendalian dan ketertiban Dinas Perhubungan Kota Medan.

Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rencana, program kegiatan rutin dalam hal memantau

situasi lalu lintas

2. Mempersiapkan bahan-bahan petunjuk teknis yang akan diterapkan di lapangan dalam lingkup pengendalian dan ketertiban.
3. Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan masukan untuk kajian kerja seksi pengendalian dan ketertiban.
4. Member pelayanan melalui izin yang dikeluarkan untuk menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas.
5. Member pembinaan, pengawasan bagi para pemegang izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
6. Membuat bahan evaluasi dan monitoring hasil kerja di lapangan.
7. Menerima dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala boding lalu lintas dan angkutan darat.

Kepala Bidang Perparkiran

1. Ikhtisar Jabatan

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Parkir Khusus dan Parkir Harian dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan kegiatan dalam bidang perparkiran yaitu menyusun rencana program dan kegiatan di bidang perparkiran dengan system evaluasi tugas dan program seluruh hasil kerja staf perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perparkiran yaitu: menyusun petunjuk teknis lingkup perparkiran mulai dari parker Khusus, Parkir Harian Wilayah I dan Parkir Harian Wilayah II di Kota Medan yang

dibantu dengan 3 (tiga) kepala seksi.

3. Pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan tempat khusus yaitu: meningkatkan pelayanan perparkiran untuk tempat umum dan khusus dengan mengoptimalkan seluruh petugas parkir di lapangan mulai dari pengawas dan juru parkir rmenyangkut pelayanan kepada seluruh masyarakat pengguna jasa parkir.
4. Pelaksanaan proses pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum yaitu: mempercepat pelaksanaan proses pemberian izin kepada para pemegang izin ataupun bagi pegawai atau tenaga honor yang mengurus Surat Perintah Tugas (SPT) dan meningkatkan penyelenggaraan perparkiran di lapangan sesuai dengan masing-masing dan memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
5. Pengoperasian fasilitas parker untuk umum dan jalan kota yaitu: membuat fasilitas parkir untuk umum dan jalan kota dengan memasang *Traficon* untuk pembatas jalan agar mudah kendaraan untuk diparkirkan di badan jalan.
6. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian lingkup parker yaitu: melakukan pembinaan suatu pengawas di lingkungan parkir Kota Medan dengan cara langsung turun ke lapangan untuk memberikan arahan kepada para juru parker agar bertugas dan membuat parkir resmi di lapangan dan melakukan Pengawasan pelaksanaan tugas juru parkir di lapangan.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang

perparkiran yaitu: melaksanakan monitoring kelapangan atau kinerja petugas di lapangan yaitu mulai dari tugas juru parkir dan Pengawas yang harus bertugas setiap hari yang di lapangan dan memeriksa penyeteroran setiap harinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam Surat Izin maupun Surat Perintah Tugas.

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya yaitu menghadiri rapat yang diperintahkan ke Kepala Dinas Perhubungan dan melakukan pembinaan serta menandatangani DP3 bagi PNS dalam melaksanakan tugas setiap harinya Kepala Bidang perparkiran dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi Parkir Khusus, kepala Seksi Parkir harian Wilayah I dan Kepala Seksi Wilayah II, serta dibantu oleh staf umum untuk urusan kepegawaian, tata usaha dan oleh 1 (satu) orang bendahara pembantu yang bertugas menerim asset orang retribusi parker sekaligus menyeterorkan ke kas Pemko Medan melalui Bendahara Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Tujuan Jabatan

Menyiapkan rencana kerja di bidang perparkiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kepala bidang perparkiran mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang perparkiran yaitu:
 - a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi sebagai bahan untuk

- rencana kerja di bidang perparkiran.
- b. Mempelajari dasar-dasar penyelesaian tugas di bidang perparkiran.
 - c. Merusmuskan kebutuhan dan dukungan sarana prasarana penyusunan program Bidang Perparkiran di Kota Medan.
 - d. Menyusun rencana kerja tahunan Bidang Perparkiran.
 - e. Mengajukan rancangan kerja Bidang Perparkiran kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapat koreksi atau persetujuan.
2. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan perparkiran di Kota Medan yaitu:
- a. Merumuskan kebutuhan data dan informasi relevan di bidang perparkiran.
 - b. Mengumpulkan data informasi suatu peningkatan PAD Kota Medan.
 - c. Melaksanakan tugas lanjut hasil rapat koordinasi kerja berdasarkan petunjuk atasan.
3. Melaksanakan monitoring evaluasi pendapatan retribusi parker untuk pelaksanaan target PAD Kota Medan yaitu:
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi target setiap lokasi parkir.
 - b. Menyusun akuntabilitas kinerja di bidang parker untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian tugas SKPD yaitu:
- a. Mewakili pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan persetujuan tertulis atasan.

- b. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada atasan.
 - c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi kerja.
5. Pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di Bidang Perparkiran Kota Medan yaitu:
- a. Membimbing bawahan untuk meningkatkan retribusi dan prestasi kerja.
 - b. Memantau pelaksanaan disiplin kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menandatangani DP3 bawahan, serta memberikan peringatan kepada bawahan yang menyangkut pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hasil kerja Kepala Bidang Perparkiran: Rancangan rencana kerja tahunan bidang perparkiran, laporan implementasi pelaksanaan tugas bidang parkir, rancangan hasil tindak lanjut tugas-tugas lain, meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bidang parkir, meningkatkan disiplin bawahan.

Kepala Seksi Parkir Khusus

3. Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Khusus Bidang perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perparkiran. Lingkup parker khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain:

1. Tugas dan Kegiatan:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan parker khusus
 - b. Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir khusus
 - c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran Khusus dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus.
 - d. Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tempat-tempat khusus
 - e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pengawasan pengendalian lingkup parkir khusus
 - f. Penyiapanbahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan:
- a. Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis.
 - b. Mempelajari tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
 - c. Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d. Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I)

Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) Bidang perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perparkiran Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah I) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain:

1. Tugas dan kegiatan :
 - a. Penyiapan rencana program dan kegiatan parker tepi jalan.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk parker tepi jalan Wilayah I.
 - c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I).
 - d. Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah I).
 - e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian perparkiran.
 - f. Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan :

- a. Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan.
- b. Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
- c. Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
- d. Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II)

Ikhtisar Jabatan

Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan (Wilayah II) Bidang perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perparkiran, Lingkup Parkir Harian Tepi Jalan 9 Wilayah II) dalam melaksanakan tugas pokok dan kegiatan antara lain:

1. Tugas dan Kegiatan:
 - a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan parker tepi jalan.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk lingkup parkir tepi jalan Wilayah II.
 - c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan di Bidang Perparkiran dan pemberian izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II).
 - d. Pelaksanaan proses perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum (Wilayah II).
 - e. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan, pengawasan,

pengendalian perparkiran.

- f. Penyiapan bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan:
 - a. Menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan secara tertulis maupun lisan.
 - b. Mempelajari tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.
 - c. Meneruskan pelaksanaan tindak lanjut dari tugas-tugas lain yang diberikan.
 - d. Menugaskan pelaksanaan untuk mempersiapkan rumusan parkir.

3. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sebab dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini. Oleh karena itulah deskripsi identitas responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu : jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan usia responden.

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir Terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia,

dimana dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan sebanyak 40 orang masyarakat yang menggunakan jasa parkir yang dijadikan sebagai responden.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 40 orang responden dimana 40 kuesioner yang dibagikan kepada responden maka semua kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi identitas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, untuk lebih jelasnya akan disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	14	35%
2	Perempuan	26	65%
	Total	40	100%

Sumber: Hasil Data Olahan Penulis (2018)

Dari tabel 4.1 yakni karakteristik responde nmenurut jenis kelamin responden, maka dari 40 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka kelompok responden berdasarkan jenis kelamin yang

terbesar dalam penelitian ini adalah perempuan yakni sebanyak 26 orang atau 65%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan yang menggunakan jasa parkir di Kecamatan Medan Helvetia adalah didominasi oleh kaum perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki 14 orang atau 35%.

b. Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan menunjukkan pengetahuan dan daya pikir yang dimiliki oleh seorang responden. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) bagian yaitu : SD/SMP/SMA, D3, S1, dan S2. Adapun deskripsi profil responden menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase%
1.	SD/SMP/SMA	25	62.5%
2.	D3	7	17.5%
3.	S1	2	5%
4.	S2	1	2.5%
5.	Tidak Mengisi	5	12.5%
	Total	40	100%

Sumber : Hasil Data Olahan Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai hasil distribusi frekuensi responden menurut jenis pendidikan terakhir, Nampak bahwa sebagian besar responden lebih banyak jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sejumlah 25 orang dengan persentase 62.5%, D3 (Diploma tiga) sebanyak 7 orang atau

17.5%, jenjang S1 (Strata satu) sebanyak 2 orang atau 5%, S2 (Strata dua) 1 orang atau 2.5%, dan responden yang tidak mengisi ada 5 orang dengan persentase 12.5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata jenis pendidikan terakhir yang menjadi pengguna jasa parkir terbanyak di kecamatan Medan Helvetia adalah pendidikan SD/SMP/SMA.

c. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Deskripsi karakteristik responden menurut jenis pekerjaan yaitu menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden menurut jenis pekerjaan responden. Dalam deskripsi karakteristik responden, dikelompokkan menurut jenis pekerjaan responden yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase%
1.	Pegawai Negeri	7	17.5%
2.	Pegawai Swasta	6	15%
3.	Wiraswasta	12	30%
4.	Tidak Mengisi	15	37%
	Total	40	100%

Sumber : Hasil Data Olahan Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, Nampak bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini lebih memilih tidak mengisi jenis pekerjaannya sebanyak 15 orang dengan persentase 37%, Pegawai Negeri 7 orang dengan persentase 17.5%, Pegawai Swasta 6 orang dengan persentase 15%, Wiraswasta 12 orang dengan nilai persentase 30%.

d. Berdasarkan Usia Responden

Deskripsi responden menurut usia menguraikan atau memberikan gambaran mengenai usia responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam deskripsi karakteristik responden menurut usia dapat disajikan deskripsi karakteristik responden menurut usia yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

No	Usia	Tanggapan Responden	
		Jumlah	Persentase%
1.	< 25 Tahun	27	67.5%
2.	25-30 Tahun	8	20%
3.	>30 Tahun	4	10%
4.	Tidak Mengisi	1	2.5%
	Total	40	100%

Sumber : Hasil Data Olahan Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 yakni tanggapan responden mengenai usia, maka didominasi oleh usia <25 tahun yakni sebesar 67.5%, usia 25-30 tahun 8 orang atau 20%, >30 tahun 4 orang atau 10%, dan tidak mengisi ada 1 orang atau 2.5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelanggan yang menjadi pengguna jasa parkir di Kecamatan Medan Helvetia mempunyai usia <25 tahun.

4. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel, dengan 2 (dua) variable bebas yaitu, pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir, serta 1

(satu) variabel terikat yaitu kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.

Dalam penyebaran kuesioner, masing-masing indikator dari variabel memiliki 5 (lima) butir pertanyaan/pernyataan. Variabel bebas pemungutan retribusi parker memiliki 3 (tiga) indikator sehingga ada 15 (lima belas) butir pertanyaan/pernyataan, pelayanan parker memiliki 3 (tiga) indikator sehingga ada 15 (lima belas) butir pertanyaan/pernyataan dan variabel terikat kinerja badan pengelola perparkiran memiliki 2 indikator sehingga ada 10 butir pertanyaan/pernyataan. Kuesioner tersebut harus di isi oleh 40 responden yang terdiri dari masyarakat pengguna jasa parkir. Jawaban kuesioner terdiri dari 5 (lima) skala likert seperti yang ada pada table dibawah ini :

Tabel 4.5 Skala Likert

Skala Likert	Skor untuk Pertanyaan/pernyataan
Sangat Setuju (SS)	1
Setuju (S)	2
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	5

Sumber : Penulis, (2018)

5. Deskripsi Analisis Data

a. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Syarat standar untuk memenuhi syarat apakah setiap pernyataan valid atau tidak, yaitu dengan cara membandingkan dengan $r_{\text{tabel}} = 0.30$. Apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.30 maka butir dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka dinyatakan valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pertanyaan	Korelasi (r-hitung)	r tabel	Keterangan
1	Pemungutan Retribusi Parkir (X1)	Butir 1	0.625	0.30	Valid
		Butir 2	0.633	0.30	Valid
		Butir 3	0.685	0.30	Valid
		Butir 4	0.743	0.30	Valid
		Butir 5	0.728	0.30	Valid
		Butir 6	0.596	0.30	Valid
		Butir 7	0.620	0.30	Valid
		Butir 8	0.513	0.30	Valid
		Butir 9	0.538	0.30	Valid
		Butir 10	0.564	0.30	Valid
		Butir 11	0.619	0.30	Valid
		Butir 12	0.622	0.30	Valid
		Butir 13	0.604	0.30	Valid
		Butir 14	0.672	0.30	Valid
		Butir 15	0.472	0.30	Valid
2	Pelayanan Parkir (X2)	Butir 1	0.634	0.30	Valid
		Butir 2	0.759	0.30	Valid
		Butir 3	0.468	0.30	Valid
		Butir 4	0.836	0.30	Valid
		Butir 5	0.797	0.30	Valid
		Butir 6	0.762	0.30	Valid
		Butir 7	0.545	0.30	Valid
		Butir 8	0.729	0.30	Valid

No	Variabel	Butir Pertanyaan	Korelasi (r-hitung)	r- tabel	Keteranga n
		Butir 9	0.595	0.30	Valid
		Butir 10	0.516	0.30	Valid
		Butir 11	0.656	0.30	Valid
		Butir 12	0.761	0.30	Valid
		Butir 13	0.751	0.30	Valid
		Butir 14	0.780	0.30	Valid
		Butir 15	0.300	0.30	Valid
3	Kinerja Badan Pengelola Perparkiran (Y)	Butir 1	0.543	0.30	Valid
		Butir 2	0.804	0.30	Valid
		Butir 3	0.509	0.30	Valid
		Butir 4	0.522	0.30	Valid
		Butir 5	0.463	0.30	Valid
		Butir 6	0.621	0.30	Valid
		Butir 7	0.538	0.30	Valid
		Butir 8	0.620	0.30	Valid
		Butir 9	0.549	0.30	Valid
		Butir 10	0.710	0.30	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS versi 22 Penulis (2018)

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.6 bahwa masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Dapat dikatakan valid karena nilai Korelasi (r_{hitung}) lebih besar dibandingkan dengan nilai r_{tabel} .

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui dan yakin sistem alat ukur dalam penggunaannya. Dengan kata lain, untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab butir-butir yang berkaitan dengan pernyataan yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Reliabilitas suatu variabel dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbacs alpha* yang lebih besar ($>$) 0,60.

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1	Pemungutan Retribusi parkir (X1)	0.752	0,60	Reliabel
2	Pelayanan parkir (X2)	0.756	0,60	Reliabel
3	Kinerja Badan Pengelolaan Perparkiran (Y)	0.745	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa konstruk pertanyaan *Cronbachs Alpha* persepsi mengenai pemungutan retribusi parkir (X₁) sebesar $0.756 > 0.60$ bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden menyatakan *reliable* atau handal, konstruk pertanyaan pelayanan parkir (X₂) sebesar $0.756 > 0.60$ menyatakan *reliable* atau handal.

Konstruk pertanyaan kinerja badan pengelola perparkiran (Y) *Cronbachs Alpha* sebesar $0.745 > 0.60$ menyatakan *reliable* atau handal.

b. Pengujian Asumsi Klasik

Syarat untuk menghasilkan model regresi yang baik maka diperlukan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 19 setelah dilakukan transformasi data maka didapatkan hasil uji klasik seperti yang di jelaskan dibawah ini :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki data terdistribusi normal. Data yang normal ialah keharusan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas data untuk penelitian ini menggunakan uji *One Sample Komogrov-Smirnov Test*.

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data

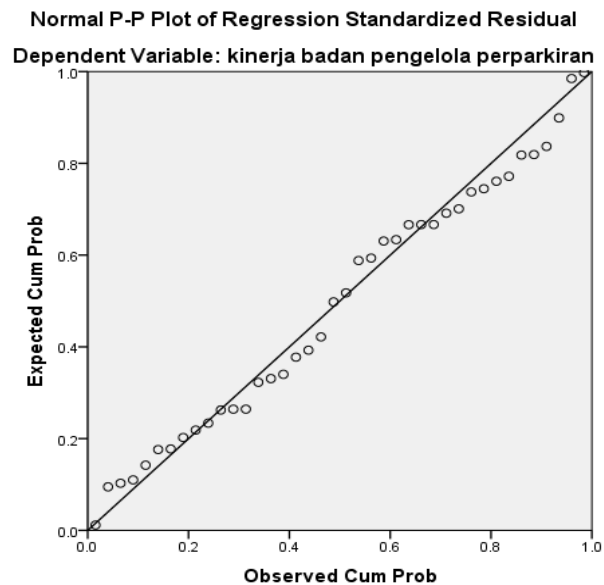
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,52422017
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

a) Dengan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 0,082 dan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200. Berdasarkan hasil keputusan bahwa nilai *Asymp. Sig.* perlu dibagi 2 sehingga $0,200/2 = 0,1$, kemudian tingkat signifikan pun dibagi 2 yaitu $0,06/2 = 0,03$, dan hasil dapat disimpulkan bahwa $0,1 > 0,03$ sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data residual normal.

b) Dengan P-P Plot



Sumber ; Hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

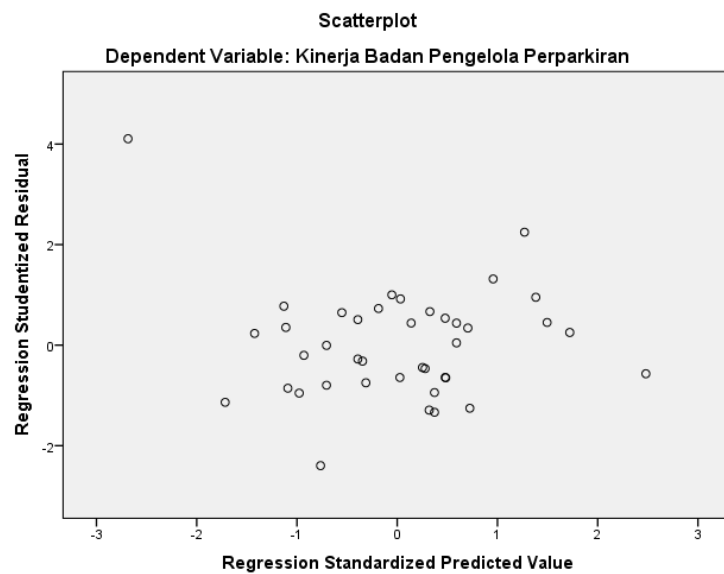
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, gambar PP Plot Uji Normalitas. Untuk hasil pengujian normalitas dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik diatas yang menyebar disekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap atau disebut homokedastisitas.

Untuk mengetahui terjadi atau tidak heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, dapat digunakan metode grafik pilot antara lain prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Sumber : Hasil Olahan SPSS 22Penulis (2018)

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu, sehingga model ini layak dipakai.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Ada tidaknya masalah multikolinieritas dalam sebuah model regresi dapat dideteksi dengan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai toleransi (*tolerance*). Apabila nilai *tolerance* ($>$) 1,10 dan nilai VIF ($<$) 10 maka disimpulkan terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemungutan Retribusi Parkir	,695	1,439
Pelayanan Parkir	,695	1,439
a. Dependent Variable : Kinerja Badan pengelola Perparkiran		

Sumber : hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.9 dapat diketahui Pemungutan Retribusi parker sebesar $0,695 > 0,10$, variable pelayanan parker sebesar $0,695 > 0,10$. Sedangkan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) yang memiliki nilai lebih kecil dari 10, antara lain Pemungutan Retribusi Parkir $1,439 < 10$ dan Pelayanan Parkir $1,439 < 10$ sehingga tidak terjadi multikolonearitas.

c. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variable bebas yang terdiri dari pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parker secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable terikat kinerja badan pengelola perparkiran. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* (0,05). Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	191,279	2	95,640	14,240	,000 ^b
Residual	248,496	37	6,716		
Total	439,775	39			
a. Dependent Variable :Kinerja Badan Pengelola Perparkiran					
b. Predictors: (Constant), PelayananParkir, Pemungutan Retribusi Parkir					

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

Berdasarkan Uji Simultan pada tabel 4.10 diatas menyatakan perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah $14,240 > F$ tabel 2,32 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variable independen yaitu Pemungutan Retribusi Parkir (X_1), Pelayanan Parkir (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Kinerja Badan Pengelola Perparkiran (Y).

2. Uji Signifikan parsial (Uji t)

Uji signifikan parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara parsial terhadap variable terikat. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parker secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perparkiran. Variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja badan pengelola parker ketika signifikan $< 0,05$.

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandartized Coefficients		Standartized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	17,875	2,838		6,298	,000
PemungutanRetribusiParkir	,398	,075	,785	5,293	,000
PelayananParkir	-147	,062	-,349	-2,358	,024

a. Dependent Variable : Kinerja Badan Pengelola Perparkiran

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22 penulis (2018)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas terbukti bahwa variable Pemungutan Retribusi Parkir (X_1) dan Pelayanan Parkir (X_2) berpengaruh dengan Kinerja Badan pengelola Perparkiran (Y).

Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing variabel :

- a) Pengujian Hipotesis Pemungutan Retribusi Parkir terhadap Kinerja Badan Pengelola.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis akan diterima jika nilai signifikan lebih kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa hipotesis1 diterima, berarti Pemungutan Retribusi Parkir memiliki pengaruh terhadap Kinerja Badan PengelolaPerparkiran.

- b) Pengujian Hipotesis Pelayanan Parkir terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran.

Nilai signifikan variable Pelayanan Parkir sebesar 0,024. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan Pelayanan Parkir lebih kurangdari 0,05. Maka disimpulkan bahwa hipotesis ke 2 diterima, berarti Pelayanan Parkir memiliki pengaruh terhadap Kinerja Badan Pengelola

Perparkiran.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jumlah kemampuan model dalam memvariasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi diantaranya adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan antar variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas.

Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,660 ^a	,435	,404	2,592
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Parkir, Pemungutan Retribusi Parkir				
b. Dependent Variable: Kinerja Badan Pengelola Perparkiran				

Sumber : Hasil Olahan SPSS 22 Penulis (2018)

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa angka R Square 0,435 yang dapat disebut Koefisien Determinasi yang dalam hal ini berarti 43,5% hasil pilihan Kinerja Badan Pengelola Perparkiran, dapat diperoleh dan dijelaskan oleh Pemungutan Retribusi Parkir dan Pelayanan Parkir. Sedangkan sisanya $100\% - 43,5\% = 56,5\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variable diluar model.

B. Pembahasan

1. Teori

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Siahaan (2013 : 6) Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa “pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menggunakan satu variabel yaitu potensi penerimaan retribusi parkir dengan hasil penelitian bahwa target yang ditetapkan 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya, jadi terdapat 48,50% kapasitas yang hilang.

Sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir dan satu variabel terikat yaitu kinerja badan pengelola perparkiran. Nilai *R Square* menunjukkan 0,435 bahwa mempengaruhi Kinerja Badan Pengelola Perparkiran di Kecamatan medan Helvetia sebesar 43,5%. Sedangkan sisanya sebesar 56,5% yang dapat dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

3. Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian variabel Pemungutan Retribusi Parkir (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Badan Pengelola Perparkiran (Y) pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan. Terlihat dari nilai signifikannya yaitu ($0,000 < 0,05$).

Dari hasil pengujian variabel Pelayanan Parkir (X_2) secara parsial terlihatmemilikipengaruh yang signifikanterhadapKinerja Badan PengelolaPerparkiran (Y) pada Kantor DinasPerhubungan Kota Medan. Terlihat dari nilai signifikannya yaitu $0,024 < 0,05$).

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa informasi yang didapat berkenaan dengan judul skripsi ini dengan rumusan masalah “Seberapa besarkah pengaruh pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir terhadap

kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia?”

Sistem pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Parkir Kota Medan, semua pelaksanaan pemungutan sudah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan parkir yang telah dibuat. Tetapi dari beberapa juru parkir resmi dalam pemungutan retribusi parkir tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir atau pengguna tempat parkir.

Tabel 4.13 Hasil Penelitian

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2015	27.968.600.000,-	19.882.116.000,-	71,87
2	2016	27.968.600.000,-	20.872.291.000,-	74,62
3	2017	41.468.600.000,-	4.874.377.000,-	11,76

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan (2018)

Dari hasil penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, retribusi parker dari tahun 2015 – 2016 cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastis, hal ini terjadi karena pemungutan retribusi parkir yang belum efektif dan belum tertibnya petugas pemungut (juruparkir).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemungutan retribusi parkir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.
2. Pelayanan parkir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.
3. Pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir berpengaruh secara simultan terhadap kinerja badan pengelola perparkiran di Kecamatan Medan Helvetia.

A. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dilihat dari fakta temuan penulis dilapangan pemungutan retribusi parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, oleh karena itu kepada pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi kebocoran retribusi parkir. Masih banyaknya parkir-parkir liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu para preman yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu untuk mencari keuntungan pribadi, oleh karena itu bagi pemerintah daerah kota Medan melalui dinas perhubungan kota Medan dapat melakukan penertiban terhadap parkir liar.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian penulis tentang pengaruh pemungutan retribusi parkir dan pelayanan parkir terhadap kinerja badan pengelola perparkiran, pihak kampus dapat mengarsipkannya ke perpustakaan agar memperluas pengetahuan para pembaca.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan tambahan referensi jika ingin meneliti kembali dalam judul yang sama atau melengkapi dan menambah variabelnya di lokasi yang sama maupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelola Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelola Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Aditya, Tjiptjono. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian*. 2011:23.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Budiarto, Sarwo, et al. 2016. *Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda*. Samarinda: eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 No. 3. Universitas Mulawarman. <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>. Diakses tanggal 19 Oktober 2016.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Ida Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ilosa, Abdiana, et al. 2016. *Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*. Natapraja: *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 4 No. 2.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. <https://journal.uny.ac.id>. Diakses pada tahun 2013.

- Jufrizen, 2013, *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan*. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 13 No. 01. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahsun. 2012. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan strategi, metode, tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. JUMANT, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 669-693.
- Putra Yoan Santosa, 2013, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa parkir (Studi Pada Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang)*. Journal Riset Mahasiswa Manajemen. Universitas Kanjuruhan Malang. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>. Diakses pada 28 Agustus 2013.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. Int. J. Bus. Manag. Invent, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sembiring, Masana, 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*. Bandung : Fokusmedia.

- Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suhartini, 2014, *Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singing*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau. repository.uin-suska.ac.id
- Sujarweni Wiratma, 2014, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, Wiratna, V. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta.Pustaka Baru Press.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Suwanto, Donni. 2011. *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung :Alfabeta
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.
- Peraturan No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah.